

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas dalam RUU KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief, M. Irsan. *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi*. Mekar Cipta Lestari, 2022.
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

- Latief, Abdul. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis dan Praktik)*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni, 2012.
- Nelson, Febby Mutiara. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Noor, Hendry Julian. *Memahami Kerugian BUMN (Persero): Diskursus Kerugian Keuangan Negara dan Tipikor*. Yogyakarta: Ruas Media, 2022.
- Pramano, Nindyo. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Soeriatmadja, Arifin. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Predamedia Group, 2014.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Sulistiowati. *Pertanggungjawaban Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.
- Universitas Gadjah Mada. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*
- Yusuf, Muhammad. *Miskinkan Koruptor! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2013.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Amelia, Tina. “Tanggung Jawab Terbatas Induk Perusahaan BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Tahun 2019.” *Sol Justicia* 3, no. 2 (Desember 2020): 120.
- Azis, Muhammad Rifqi. “Transformasi Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara atas Anak Usaha BUMN.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9685.
- Carol Rosalyn Manoi dan Roi Christiawan. “Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Induk/Holding Company Atas Kerugian Pada Anak Perusahaan BUMN.” *Jurnal Hukum Staatrecht* 6, no. 1 (2023): 70.
- Damayanti, Seni Sri. “Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya Dengan Keuangan Negara.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 5343.

- Debby. "Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas Berdasarkan Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan." *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 37, no. 2 (Desember 2021): 200.
- Fitriyanti, Fina Puspita. "Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (Agustus 2022): 10711.
- Hadi, Shigeko Desiputri. "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (Juni 2021): 172.
- Handayani, Ika Apri "Konsep Materialitas dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 398. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.618>.
- Hiariej, Eddy O.S. "Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (Oktober 2024): 342.
- Hiariej, Eddy O.S. "Memahami 'Trading in Influence' dalam Kerangka UNCAC sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (Oktober 2020): 66.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 113. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.
- Khobid, Miftakhul, Gunarto, dan Latifah Hanim. "Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 39.
- Lisnawati. "Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR XI*, no. 01 (Januari 2019): 19.
- Manan, Bagir. "Seandainya Saya Hakim Bank Century." *Varia Peradilan* 30, no. 349 (Desember 2014).
- Monintja, Ester Sheren. "Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Materiil menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 98.
- Negara, Dharma Setiawan. *Holding Investasi dan Holding Operasional dalam Tata Kelola BUMN Perspektif UU No. 1 Tahun 2025*.

- Novita, Afrillia Bella, et al. “Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1*, no. 5 (Juni 2023): 175.
- Pasmatuti, Darda. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 1*, no. 1 (2019): 102.
- Pratama, Deny Adi. “Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap Negara pada Holding Badan Usaha Milik Negara.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2*, no. 2 (Juni 2022): 1604.
- Putri, Hardina Anindya, dan Eko Soponyono. “Penggunaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Diponegoro Law Journal 8*, no. 4 (2019): 2542.
- Ramon, Enoki. “Penerapan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Roza, Nelvia. “Problematika Penentuan Status Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara Persero.” *Lex Renaissance 7*, no. 1 (2022): 44.
- Sofian, Ahmad. “Tafsir Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Dikaitkan dengan Ajaran Klausalitas.” *Halu Oleo Law Review 9*, no. 2 (September 2025): 90.
- Tjandra, W. Riawan. Dalam Viktoris Dahoklory. “Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal ‘Dilema’ Antara Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9*, no. 3 (2020): 353.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457>.

Tesis

- Nuraini Lestari, Ica Ayu. “Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja”, Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya, 2022
- Sakti, Dhenis Prabowo. “Status Negara dalam Anak Perusahaan BUMN dan Akibat Hukum Akta Pendirian atau Penyertaan Modal ke dalam Anak Perusahaan yang Dibuat oleh Notaris (Studi Kasus PT INKA Persero).” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Perangin-Angin, Fadlan Khairad, “Pengembalian Keuangan Negara Akibat Kerugian Anak Perusahaan BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025

Website

Auli, Renata Christi. “Bentuk Pengendalian Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan.” *Hukumonline.com*. Diakses 4 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-pengendalian-induk-perusahaan-terhadap-anak-perusahaan-lt6511606f18f88/>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI VI Daring*. Diakses 2 Desember 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

Detiknews. “Kejagung Tetapkan Tersangka ke-8 Kasus Korupsi Rp 282 di Anak Usaha BUMN.” Diakses 17 November 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6733180/kejagung-tetapkan-tersangka-ke-8-kasus-korupsi-rp-282-di-anak-usaha-bumn>.

Detiknews. “Penampakan Tumpukan Duit Rp 8,9 M yang Dikorupsi Anak Perusahaan BUMN.” Diakses 17 November 2025. <https://news.detik.com/berita/d-5828658/penampakan-tumpukan-duit-rp-8-9-m-yang-dikorupsi-anak-perusahaan-bumn>.

Duniadosen.com. “Pengertian Data Penelitian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya.” Diakses 1 Februari 2025. <https://duniadosen.com/data-penelitian/>.

Hakim, Jefferson, dan Nael Yehezkiel. “Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?” Diakses 3 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/?page=2>

Indonesia Corruption Watch. *Kertas Posisi Prahara BPI Danantara: Potensi ‘Kejahatan Sempurna’ Korupsi?* Diakses 28 Februari 2025. <https://www.antikorupsi.org/id/prahara-bpi-danantara-potensi-kejahatan-sempurna-korupsi>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. “KPK Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN.” Diakses 17 Agustus 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn>.

Kompas.com. “Daftar 9 Tersangka Korupsi Pertamina Patra Niaga Beserta Perannya dalam Mengoplos Pertamina.” Diakses 1 Maret 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/27/133000065/daftar-9-tersangka-korupsi-pertamina-patra-niaga-beserta-perannya-dalam?page=all>.

Metrotvnews. “Polri Pastikan UU BUMN Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi.” Diakses 13 Agustus 2025.

<https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C1Mz0-polri-pastikan-uu-bumn-tak-pengaruhi-penindakan-korupsi>.

Nurhakim, Candra Gunawan. “5 Fakta Erick Thohir Ingin Bubarkan 600 Anak dan Cucu BUMN.” *Okezone Finance*. Diakses 29 Januari 2025. <https://economy.okezone.com/read/2023/12/24/320/2943837/5-fakta-erick-thohir-ingin-bubarkan-600-anak-dan-cucu-bumn?page=all>.

Pajakku. “Jangan Remehkan Laporan Keuangan Konsolidasi.” Diakses 16 November 2025. <https://artikel.pajakku.com/jangan-remehkan-laporan-keuangan-konsolidasi>.

Pusat Edukasi Antikorupsi. “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi.” *Aksi-Informasi*, 15 Februari 2023. Diakses 2 Desember 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.

Seac, Angelo Emanuel Flavio, dan I Made Agus Mahendra Iswara. “Implikasi Hukum Pasca UU BUMN Terbaru terhadap Pemberantasan Tipikor.” *Hukumonline*. Diakses 21 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-hukum-pasca-uu-bumn-terbaru-terhadap-pemberantasan-tipikor-lt68725940d9d64/?page=3>.

Simatupang, Dian Puji N. “Diskursus Anak Perusahaan BUMN.” Artikel Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses 13 September 2025. <https://law.ui.ac.id/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/>.

Sudirja, Rudi Pradisetia, Wajah Baru Koordinasi Penyidik-Penuntut Umum Dalam KUHAP Nasional, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-baru-koordinasi-penyidik-penuntut-umum-dalam-kuhap-nasional>

Tjandra, W. Riawan. “Anak Perusahaan BUMN dan Penegakan Hukum Anti Korupsi.” Diakses 13 September 2025. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Wirawan-Tjandra-Aspek-Hukum-Administrasi-Negara-dalam-Pembentukan-Holding-BUMN.pdf>.

Transparency International. “Dua Dekade Korupsi BUMN Membebani Negara, Celah Kian Terbuka di Era UU Baru.” Diakses 5 Oktober 2025. <https://ti.or.id/dua-dekade-korupsi-bumn-membebani-negara-celah-kian-terbuka-di-era-uu-baru-1/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 325 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286